

ARTIKEL

FORMULASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUNINGAN

YOGAWAN PERMANA

NPM. 208010051



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses formulasi kebijakan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP) dan faktor-faktor keberhasilan dalam formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada pendapat William N. Dunn dengan lima komponen, yaitu Tahap penyusunan agenda, Tahap formulasi kebijakan, Tahap adopsi kebijakan, Tahap implementasi kebijakan, dan Tahap penilaian kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data lapangan dilakukan pada tahun 2024 dengan narasumber Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengolahan Hasil dan Konsumsi Pangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli Madya, dan Staf pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses formulasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, beberapa aspek seperti partisipasi yang lebih inklusif, pemahaman kebijakan yang lebih mendalam, dan alokasi anggaran yang lebih baik perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Keberhasilan formulasi kebijakan ini didukung oleh perencanaan yang matang, keterlibatan multi-pihak, sumber daya yang memadai, serta mekanisme evaluasi dan koordinasi yang kuat. Dengan memperkuat setiap tahapan formulasi kebijakan, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga kebijakan tidak hanya tepat dalam perumusan, tetapi juga berhasil dalam pelaksanaan dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Keberhasilan, Efektivitas Kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to determine the policy formulation process for standard operational government administrative procedures (SOP AP) and the success factors in formulating SOP AP policies at the Kuningan Regency Food and Agriculture Security Service. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. This research refers to William N. Dunn's opinion with five components, namely the agenda preparation stage, policy formulation stage, policy adoption stage, policy implementation stage, and policy assessment stage. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The field data collection process will be carried out in 2024 with as resource persons the Head of Service, the Secretary, the Head of the Product Processing and Food Consumption Division, the Head of the General and Civil Service Sub-Division, Middle Expert Planner, and implementing staff. The research results show that in general the policy formulation process has gone well, several aspects such as more inclusive participation, deeper understanding of policies, and better budget allocation need to be improved so that policies can be implemented more effectively. The success of this policy formulation is supported by careful planning, multi-stakeholder involvement, adequate resources, and strong evaluation and coordination mechanisms. By strengthening each stage of policy formulation, policy effectiveness can be increased significantly, so that policies are not only appropriate in formulation, but also successful in implementation and produce the desired impact.

Keywords: Policy Formulation, Standard Operating Procedures, Success, Policy Effectiveness.

RINGKESAN

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho prosés nyusun kawijakan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pamaréntahan (SOP AP) jeung faktor-faktor kasuksesan dina nyusun kawijakan SOP AP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta méthode déskriptif kalawan pamarekan kualitatif. Ieu panalungtikan nuduhkeun pamadegan William N. Dunn kalayan lima komponén, nya éta tahap nyusun agénda, tahap nyusun kawijakan, tahap nyoko kana kawijakan, tahap ngalaksanakeun kawijakan, jeung tahap pangajen kawijakan. Ngumpulkeun data dilaksanakeun ku cara obsérvasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Kukumpul data lapangan baris dilaksanakeun dina taun 2024 kalawan pangjejer salaku narasumber Kapala Dinas, Sekertaris, Kapala Bidang Pangolahan Produk jeung Konsumsi Pangan, Kapala Sub Bagian Umum jeung Kapagawéan, Perencana Ahli Madya, jeung staf pelaksana. Hasil panalungtikan némbongkeun yén sacara umum prosés nyusun kawijakan geus lumaku kalawan hadé, sababaraha aspék sapertos partisipasi anu leuwih rempeg, pamahaman anu leuwih jero ngeunaan kawijakan, jeung alokasi anggaran anu hadé kudu dironjatkeun sangkan kawijakan tiasa dilaksanakeun kalawan leuwih suksés. Kasuksésan rumusan kawijakan ieu dirojong ku rarancang anu asak sasaran, kasabit réa-pihak, sumberdaya nyukupan, sarta mékanisme evaluasi jeung koordinasi nu kuat. Ku nguatkeun unggal tahapan nyusun kawibajakan, Suksésna kawijakan tiasa ditingkatkeun sacara jelas, ku kituna kawijakan henteu ngan ukur pas dina parumusan, tapi ogé hasil dina palaksanaan jeung ngahasilkeun balukar anu dipikahoyong.

Kecap Konci: Formulasi Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Kasuksesan, Suksésna Kawijakan.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya, secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya *good government* dan *good governance* untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbelit-belit. Untuk mengubah pandangan tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah, yakni pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk dapat membangun profil pegawai dan perilaku pegawai negara yang memiliki produktivitas, integritas, dan bertanggungjawab serta kemampuan dalam memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir serta budaya kerja yang ada dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama, yang meliputi: (a). organisasi, (b). tata laksana, (c). peraturan perundang-undangan, (d). sumber daya manusia pegawai, (e). pengawasan, (f). akuntabilitas, (g). pelayanan publik, dan (h). pola pikir dan budaya kerja pegawai.

Salah satu perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi adalah tata laksana, dimana perubahan ketatalaksanaan pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya penataan tata laksana antara lain diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas serta fungsi sebagai aparatur pemerintah. Soemohadiwidjojo (2014:11) menjelaskan SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Sejalan dengan Hadiwiyono dan Panjaitan (2013:227-232) menjelaskan bahwa SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, yaitu tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), dimana peraturan ini merupakan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun SOP AP di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang efisien sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi. SOP menjadi alat penting dalam mencapai tujuan tersebut karena dapat menjadi panduan yang jelas bagi setiap pegawai untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Tanpa SOP yang baik, akan sulit bagi dinas untuk memastikan bahwa semua kegiatan administrasi dilakukan secara konsisten dan efisien.

Ketahanan pangan dan pertanian merupakan sektor yang sangat dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan iklim, teknologi, dan dinamika pasar

pangan global. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang adaptif dan responsif menjadi suatu keharusan. Dalam hal ini, SOP tidak hanya berfungsi sebagai panduan kerja, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja dan alat untuk melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan masukan dari implementasi di lapangan. Perumusan SOP yang baik memerlukan analisis yang mendalam terhadap proses kerja yang ada, identifikasi titik-titik kritis yang memerlukan perbaikan, serta partisipasi aktif dari semua stakeholder terkait. SOP yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Konteks lokal menjadi penting dalam merancang SOP yang efektif, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Apabila dalam formulasi kebijakan SOP AP terjadi kesalahan, maka hasil yang didapat menjadi tidak maksimal. Kesalahan yang terjadi dalam proses operasional pada suatu instansi akan menyebabkan kerugian bagi instansi tersebut. Oleh karena itu formulasi kebijakan SOP AP juga memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah, khususnya dengan dibentuk Tim Pendamping Penyusun serta Tim Penyusun SOP AP untuk menentukan langkah-langkah yang tepat. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, saya akan mengkaji bagaimana kebijakan dan SOP yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan diformulasikan. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam formulasi SOP AP dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan kualitasnya untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik. Hasil pengamatan awal pada formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya 1) Proses Penyusunan SOP AP hanya melibatkan Tim Penyusun SOP AP tanpa melibatkan pegawai yang bekerja di lapangan atau pihak-pihak yang akan langsung menerapkan SOP tersebut. Contohnya, SOP penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dibuat oleh Sub Koordinator Keuangan (Anggota Tim Penyusun) tanpa melibatkan pegawai yang terkait, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan tertulis dan pelaksanaannya; 2) Penyusunan SOP AP tidak mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan dinas. Contohnya, beberapa SOP AP pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan hasil duplikasi dari perangkat daerah lain tanpa adanya pertimbangan dengan perbaikan atau pengembangan, sehingga SOP AP yang dibuat terlalu kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik.

Mengatasi permasalahan-permasalahan ini akan menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan SOP AP yang efektif dan efisien pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang praktis dan dapat diterapkan, tidak hanya di Kabupaten Kuningan tetapi juga di daerah lain dengan kondisi yang serupa. Adanya SOP AP yang handal dan efektif, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian.

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Moleong (2014:11) pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini mencerminkan karakteristik dari metode

kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam dan konteksnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi atau situasi tertentu berdasarkan perspektif dari objek atau subjek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya secara interaktif dan reflektif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Perolehan data primer bersumber atau diperoleh dari informan melalui observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data berupa catatan situasi dan kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data primer pelengkap atau pendukung yang digunakan dari data yang relevan, data ini berupa teori-teori yang digunakan, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi. Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Sugiyono (2010:76) menjelaskan informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka penelitian ini hanya menggunakan informasi sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat, dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengolahan Hasil dan Konsumsi Pangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli Madya, dan Staf pelaksana.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data adalah *Reduction data* (Reduksi data), *Display data* (Penyajian data), dan *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi). Keabsahan data merupakan kegiatan pemeriksaan data secara cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, Moloeng (2014:320). Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Pengujian terhadap keabsahan data yang digunakan dalam penelitian meliputi Kredibilitas dan Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan merupakan instansi pemerintah atau perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai peran penting dan akses besar dalam mensukseskan pembangunan pertanian yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kerjasama/koordinasi baik lintas sektoral maupun vertikal dengan dinas, instansi, badan lembaga terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya para petani. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Kuningan, dengan berperan penting dalam memastikan bahwa sektor pertanian tetap produktif dan berkelanjutan, serta bahwa kebutuhan pangan masyarakat

dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan diatur oleh Peraturan Bupati Kuningan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Pelaksanaan tugas pokok pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan upaya untuk menjalankan fungsi-fungsi utama yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok secara efektif, efisien, dan tepat waktu, agar dapat mendukung pencapaian kinerja dinas secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas pokok ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi. SOP menjadi salah satu alat penting dalam mencapai tujuan tersebut, karena dapat menjadi panduan yang jelas bagi setiap pegawai untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menetapkan kebijakan berupa Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 060/KPTS.760-Org/2023 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Dokumen Standar SOP AP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan merupakan panduan tertulis yang memuat serangkaian prosedur standar untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi administrasi.

Proses Formulasi Kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan

Analisis temuan penelitian formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan diulas oleh penulis pada bagian ini. Berdasarkan gagasan Wiliam N. Dunn, penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Lima komponen membentuk teori Wiliam N. Dunn, yaitu: Tahap penyusunan agenda, Tahap formulasi kebijakan, Tahap adopsi kebijakan, Tahap implementasi kebijakan, dan Tahap penilaian kebijakan.

Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh baik melalui wawancara kepada informan, observasi di lapangan, dan berbagai tulisan yang terkait dengan formulasi kebijakan SOP AP. Proses formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan adalah upaya sistematis untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012. Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 060/KPTS.760-Org/2023 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dokumen SOP AP merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Dokumen SOP AP terdiri dari SOP Pelayanan Internal, yaitu pengelolaan administrasi kesekretariatan meliputi ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan barang, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta program, data dan informasi. Sedangkan SOP Pelayanan Eksternal, yaitu pelaksanaan pelayanan teknis dan/atau

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Dalam memetakan masalah terkait administrasi dan operasional yang membutuhkan SOP yang jelas, dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, penentuan isu-isu penting yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang dirumuskan, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan agenda kebijakan. Hasil dari tahap ini adalah daftar masalah prioritas yang harus diselesaikan dan agenda kebijakan yang fokus pada pengembangan SOP yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi.

a. Penyusunan Agenda

Peneliti melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan dalam memetakan masalah terkait administrasi dan operasional yang membutuhkan SOP yang jelas, dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, penentuan isu-isu penting yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang dirumuskan, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan agenda kebijakan.

Proses identifikasi masalah melalui evaluasi rutin kinerja administrasi, laporan staf, dan audit internal menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat komprehensif dan efektif. Evaluasi rutin memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mendeteksi potensi kendala sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Laporan dari staf memberikan wawasan langsung mengenai tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari. Selain itu, audit internal menambah perspektif independen yang penting dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengumpulan dan analisis informasi untuk menemukan akar masalah merupakan langkah krusial, karena pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahan akan menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berkenaan dengan elemen prioritas masalah, bahwa fokus utama dalam penyelesaian masalah didasarkan pada tingkat urgensi dan dampaknya terhadap operasional. Masalah yang memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran pelayanan publik dan kinerja internal menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap optimal dan efisiensi operasional internal dapat dipertahankan, sehingga tujuan utama Dinas dalam memberikan pelayanan yang efektif dan responsif dapat tercapai.

Sedangkan *stakeholder* yang dilibatkan meliputi Tim Penyusun SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim Pendamping Penyusun SOP AP, dan staf pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Proses pelibatan *stakeholder* dilakukan melalui forum diskusi, di mana setiap *stakeholder* dapat memberikan masukan dan saran terkait SOP yang akan disusun. Selain itu, ada survei yang dilakukan untuk mengumpulkan pandangan *stakeholder* tentang standar yang diperlukan.

b. Formulasi Kebijakan

Peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan dalam menyusun rencana dan dokumen kebijakan berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, dengan menyusun berbagai alternatif kebijakan, mengumpulkan data dan informasi, serta menganalisis dampak kebijakan. Hasilnya yaitu dokumen rancangan SOP yang lengkap dengan prosedur-prosedur kerja dan langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh setiap unit dalam dinas.

Keterlibatan berbagai pihak dalam diskusi internal, seperti kepala dinas, sekretaris, pejabat eselon III, dan pegawai lainnya, menunjukkan adanya partisipasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan. Alternatif kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai pendekatan, yang menunjukkan adanya upaya untuk mencari solusi yang paling efektif dan sesuai dengan

permasalahan administrasi yang dihadapi. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan pertimbangan yang matang dalam menentukan arah kebijakan yang akan diterapkan.

Terdapat dua langkah dalam pengumpulan data dan informasi, yaitu jenis data yang dikumpulkan dan metode pengumpulan data. Sumber-sumber data yang terkumpul menjadi dasar penting dalam menentukan pendekatan dan isi dari SOP yang akan disusun, sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah administrasi dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

Dalam proses formulasi kebijakan SOP, analisis dampak berfokus pada bagaimana setiap alternatif kebijakan dapat mempengaruhi efisiensi kerja dinas dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan melakukan analisis ini, dinas dapat mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan untuk memilih yang paling sesuai. Selain itu, simulasi kecil digunakan sebagai alat pengujian awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang dipilih efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik sebelum diterapkan secara luas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kegagalan atau dampak negatif dari kebijakan yang diterapkan.

c. Adopsi Kebijakan

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui adopsi kebijakan dalam formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, dengan elemen proses persetujuan kebijakan, keterlibatan eksekutif, dan tingkat dukungan stakeholder. Tahap adopsi kebijakan melibatkan pengambilan keputusan formal untuk memilih dan menetapkan alternatif SOP yang akan diimplementasikan. Di sini, kebijakan diresmikan melalui persetujuan otoritas yang berwenang.

proses persetujuan kebijakan SOP di tingkat dinas melibatkan kajian mendalam dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan unit kerja, yang kemudian diakhiri dengan legitimasi formal melalui pengesahan oleh kepala dinas, memastikan kebijakan tersebut mendapat dukungan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Keterlibatan eksekutif, koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Bupati berkomunikasi secara intensif, dikehadui eksekutif terlibat dalam penyusunan kebijakan. Sehingga kebijakan SOP tidak hanya relevan secara teknis bagi dinas, tetapi juga mendukung kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan, serta mendapatkan legitimasi formal melalui pengesahan Bupati.

Tingkat dukungan *stakeholder* terhadap kebijakan SOP yang diadopsi umumnya positif, terutama dari mereka yang terlibat dalam proses perumusan, karena merasa dilibatkan dan memahami tujuan kebijakan. Namun, beberapa kritikan muncul dari pegawai yang tidak dilibatkan secara langsung, yang menilai kebijakan memiliki kelemahan dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif semua pihak selama proses perumusan sangat penting untuk memastikan dukungan penuh dan efektivitas kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam proses formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, dengan elemen sosialisasi kebijakan, kesiapan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan berfokus pada pelaksanaan operasional kebijakan secara terstruktur, dengan pengawasan ketat dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa SOP yang diadopsi berhasil meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Dalam tahap implementasi kebijakan SOP, keterlibatan aktif pegawai selama sosialisasi sangat penting. Tanggapan dan masukan yang mereka berikan membantu memastikan bahwa

kebijakan yang diterapkan relevan, efektif, dan realistis untuk dijalankan. Proses ini memungkinkan dinas untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan nyata dari lapangan, menciptakan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Terkait kesiapan sumber daya, pengakuan atas keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya untuk implementasi kebijakan perlu dilakukan secara realistis. Meskipun anggaran disiapkan secara memadai, dinas harus memastikan bahwa alokasi sumber daya dimanfaatkan secara efisien, terutama dalam pelatihan pegawai dan sosialisasi yang berkelanjutan. Penting untuk mencari solusi inovatif guna mengatasi keterbatasan keuangan tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan SOP AP. Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia menjadi aspek positif, di mana para pegawai telah menerima pelatihan dan memahami prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan secara efektif meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa pegawai telah melaksanakan tugas sesuai SOP yang disosialisasikan, adanya pegawai yang masih bingung dan tidak sepenuhnya memahami SOP merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi atau pelatihan belum sepenuhnya efektif untuk semua pegawai, terutama terkait SOP pengadaan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dinas perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki pemahaman yang sama dan dapat melaksanakan SOP dengan benar.

e. Penilaian Kebijakan

Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui penilaian kebijakan dalam proses formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, dengan elemen evaluasi efektivitas kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Tahap penilaian kebijakan bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan SOP yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan efisiensi dan kualitas administrasi, serta kepatuhan terhadap aturan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Keberhasilan kebijakan SOP diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu evaluasi kinerja pegawai, pengukuran efisiensi proses administrasi, pencapaian target organisasi, dan keselarasan dengan kebijakan daerah. Dinas secara aktif melakukan revisi SOP berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menjamin bahwa kebijakan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan perkembangan kebijakan daerah.

Dalam analisis dampak kebijakan, keterlibatan seluruh pegawai dalam evaluasi dampak kebijakan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Diskusi yang melibatkan pegawai tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah, tetapi juga menghasilkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, penting bagi dinas untuk terus mendorong keterlibatan pegawai dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP AP. Pertama, evaluasi dan revisi SOP AP secara berkala sangat penting untuk memastikan relevansi dan keefektifannya. Kedua, peningkatan kompetensi pegawai harus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan SOP dengan lebih baik. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga terkait, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur, akan mendukung pelaksanaan yang lebih baik. Pengembangan indikator kinerja juga diperlukan untuk mengukur efektivitas SOP. Terakhir, penerapan digitalisasi dalam penyusunan, pengelolaan, dan

pemantauan pelaksanaan SOP dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan SOP AP.

Faktor-Faktor Keberhasilan dalam Formulasi Kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan membutuhkan prosedur yang sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif. Tanpa SOP yang jelas, akan terjadi tumpang tindih tugas, prosedur yang tidak konsisten, dan potensi kesalahan yang mengakibatkan lambannya pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pangan dan pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa Faktor-faktor keberhasilan dalam formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan kebijakan yang jelas, dengan menetapkan indikator kinerja seperti target waktu dari setiap prosedur pelaksanaan kegiatan atau tingkat keberhasilan program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
2. Memiliki sasaran kebijakan yang terukur, seperti peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja dan memberikan pelayanan yang efektif dan responsif.
3. Melibatkan beberapa stakeholder, seperti melibatkan Tim Penyusun SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim Pendamping Penyusun SOP AP, dan staf pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Proses pelibatan stakeholder dilakukan melalui forum diskusi, di mana setiap stakeholder dapat memberikan masukan dan saran terkait SOP yang akan disusun. Selain itu, ada survei yang dilakukan untuk mengumpulkan pandangan stakeholder tentang standar yang diperlukan.
4. Terdapat sumber daya yang mendukung, seperti sumber daya finansial dengan mengalokasikan biaya atau anggaran operasional untuk mendukung pelaksanaan SOP, diantaranya biaya pelatihan pegawai dan sosialisasi. Dari sisi sumber daya manusia, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan terlibat aktif dalam pelatihan maupun mengikuti sosialisasi untuk memahami dan menjalankan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan SOP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran terbatas, kesiapan SDM dan dukungan pelatihan menjadi kekuatan utama dalam penerapan kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
5. Koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Bupati Kuningan dalam proses formulasi kebijakan SOP melibatkan komunikasi intensif melalui rapat dan konsultasi resmi yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Penyusun SOP AP di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga adanya sinkronisasi antara kebijakan SOP AP dengan prioritas daerah dan revisi berdasarkan arahan strategis dari Bupati.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Bupati Kuningan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, biasanya setiap tiga bulan, untuk menilai efektivitas pelaksanaan SOP AP. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki prosedur yang kurang efisien dan memastikan SOP AP tetap relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait formulasi kebijakan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Penyusunan Agenda

Proses identifikasi masalah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah terstruktur dengan baik dan menggunakan pendekatan komprehensif. Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan langkah yang kuat dalam manajemen masalah dan penyusunan SOP, namun ada beberapa hal yang belum diperhatikan yaitu diantaranya pengelolaan masukan yang efektif dan Pengukuran dampak dari perubahan SOP.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa proses yang dilakukan sudah cukup terstruktur dan mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam penyusunan kebijakan. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan yang diuraikan ini menunjukkan langkah yang kuat dan matang, dengan berbagai mekanisme evaluasi yang bertujuan memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, efektif, dan berbasis bukti.

3. Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan menunjukkan kerangka kerja yang cukup kuat, dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan. Namun, ada ruang untuk memperbaiki komunikasi internal dan memperluas partisipasi, sehingga kebijakan yang diadopsi lebih inklusif dan diterima secara luas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan kemajuan yang baik dengan keterlibatan aktif pegawai dan kesiapan sumber daya manusia. Namun, tantangan dalam pemahaman SOP bagi beberapa pegawai serta keterbatasan anggaran memerlukan perhatian lebih untuk memastikan kebijakan diimplementasikan dengan konsisten dan efektif.

5. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan kesadaran yang baik terhadap pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perbaikan akan sangat membantu dalam mencapai tujuan kebijakan dan meningkatkan kinerja dinas secara keseluruhan.

Selanjutnya mengenai faktor-faktor keberhasilan dalam formulasi kebijakan SOP AP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan kebijakan yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur, seperti target waktu dan tingkat keberhasilan program, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami arah kebijakan. Hal ini memungkinkan penilaian kinerja yang lebih objektif dan memudahkan dalam mengevaluasi apakah tujuan kebijakan tercapai.
2. Memiliki sasaran yang jelas, seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta pelayanan yang responsif, adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penekanan pada sasaran yang terukur akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memungkinkan pemantauan kinerja yang lebih akurat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mempertimbangkan untuk menyusun target yang lebih spesifik dan realistis untuk setiap periode evaluasi.

3. Keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses formulasi kebijakan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif. Melalui forum diskusi dan survei, masukan dari berbagai pihak dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Disarankan agar proses ini dilaksanakan secara teratur dan tidak hanya pada tahap awal penyusunan kebijakan, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi.
4. Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan SOP, termasuk pelatihan dan sosialisasi, menunjukkan komitmen yang kuat dari dinas terhadap keberhasilan kebijakan. Kesiapan sumber daya manusia yang aktif berpartisipasi dalam pelatihan adalah kekuatan yang penting.
5. Koordinasi yang intensif antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Bupati Kuningan dalam proses formulasi kebijakan SOP adalah langkah yang sangat positif. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun sejalan dengan prioritas daerah dan arahan strategis yang diberikan. Rapat dan konsultasi resmi yang dilakukan secara rutin dapat memperkuat komunikasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan adalah praktik yang baik untuk menilai efektivitas pelaksanaan SOP. Ini menunjukkan komitmen dinas terhadap perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki prosedur yang kurang efisien membantu menjaga relevansi SOP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Arnina, P., & dkk. 2016. *Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP*. Depok: Huta Publisher.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2003. *Teori Administrasi*. Jakarta: STIALAN.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, G. H. 2016. *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jessey Bass Publishers.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harsono. 2008. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammdiyah University Press.

- Hartatik, Indah Puji. 2014. *Buku Pintar Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur)*. Yogyakarta: Flashbooks.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Delta Buku.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Akummi.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta: UI Press.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model- model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sailendra, Annie. 2015. *Langkah-langkah raktis Membuat SOP*. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemohadiwidjojo, A. T. 2014. *Mudah menyusun SOP*. Jakarta: Penebar PLUS+.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafhendry, Rahyunir Rauf dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal/ Penelitian

- Atalanta, G. U. O. (2018). *Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Malang Tahun 2018 (Studi pada Dewan Pengupahan Kota Malang)*, (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*.
- Hadiwiyono, P. S., Panjaitan, T.W. “*Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) di Departemen Human Resources di PT. X*”, Jurnal Titra 1. 2. (2013):227-232.
- Insani, Istyadi, 2010. “*Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah.*” Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bandung.
- Nurfitriana, N. (2021). *Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sanoto, H. (2020). *Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Dalam Rangka Peningkatan Mutu Manajemen Organisasi*. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 10(3), 263-268.
- Suandi, I. W. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2017. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 060/KPTS.760-Org/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.